



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
*Alamat : Jalan Pangeran Kesuma Negara (Gedung Abdi Negara Lt. 3) Kotabaru-Kalimantan Selatan 72111*  
*Telp/Fax. (0518)21438 Email : [diskominfo@kotabarukab.go.id](mailto:diskominfo@kotabarukab.go.id)*

# RENCANA KERJA PENETAPAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024

## RENJA PENETAPAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-NYA, maka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 dapat disusun sesuai jadwal dan aturan-aturan yang berlaku.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru ini dibuat sebagai Pedoman Perencanaan Pembangunan Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten Kotabaru untuk tahun 2024 dan merupakan bentuk implementasi dari Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 ini disusun dan disampaikan untuk menjadi pedoman awal pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024. Untuk kesempurnaan sebuah Renja, sangat diharapkan masukan yang konstruktif dan atas kerjasamanya dari berbagai pihak kami mengucapkan terima kasih.

Kotabaru,            September 2023  
Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Kotabaru,

Ir. KAMIRUDIN, M.Si  
NIP. 19661222 199503 1 004  
Pembina Utama Muda (IV/c)

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2022	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja SKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2. Tujuan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika	22
3.3. Sasaran Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika	25
3.4. Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika	27
3.5. Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika	28
BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	30
4.2. Permasalahan dan Solusi	33
BAB. V. PENUTUP	36
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	

## DAFTAR GAMBAR

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Alur penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024	3
------------	--	---

## DAFTAR TABEL

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022	14
Tabel. 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
Tabel. 2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2024 Kabupaten Kotabaru	19
Tabel 2.5.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kotabaru	19
Tabel 2.6.	Usulan Program Pengembangan Base Transceiver Station (BTS) Berdasarkan Usulan Masyarakat Tahun 2024	20
Tabel 3.1.	Tujuan Rencana Kerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024	25
Tabel 3.2.	Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024	27
Tabel 3.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2024	29
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	32
Tabel 4.2.	Indikatif Permasalahan dan Solusi	33

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru, eksistensinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan **Peraturan Bupati (PERBUP)** Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Kotabaru. Sebelumnya Sektor Komunikasi Dan Informatika telah melebur kedalam Sektor Perhubungan, dengan nama Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika. Sebagai unsur Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informasi, meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melewati media, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses kesegnap fungsi layanan pemerintah dari satu wilayah/lokasi secara efektif dan efisien merupakan arah yang akan dicapai dalam penerapan *e-government*. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Maksud dari Inpres tersebut adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Konsep pembangunan komunikasi dan informatika masa depan harus dirumuskan secara komprehensif, dimana dapat mengantisipasi berbagai tantangan, seperti kebijakan global dan otonomi daerah, salah satu model yang dapat mengantisipasi tantangan perubahan global adalah pengembangan sistem

komunikasi dan informatika yang berkelanjutan (*sustainable communication and information*).

Pemerintah mempunyai peran sebagai eksekutor dan regulator dalam menciptakan sistem komunikasi yang demokratis. Sebagai eksekutor pemerintah memfasilitasi dan menyediakan ruang dan saluran/media yang diperlukan untuk menyampaikan informasi kepada elemen masyarakat, dan sebagai regulator, pemerintah juga dapat mengharuskan pihak swasta dalam peran melaksanakan komunikasi publik yang sesuai dengan tujuan mencerdaskan masyarakat.

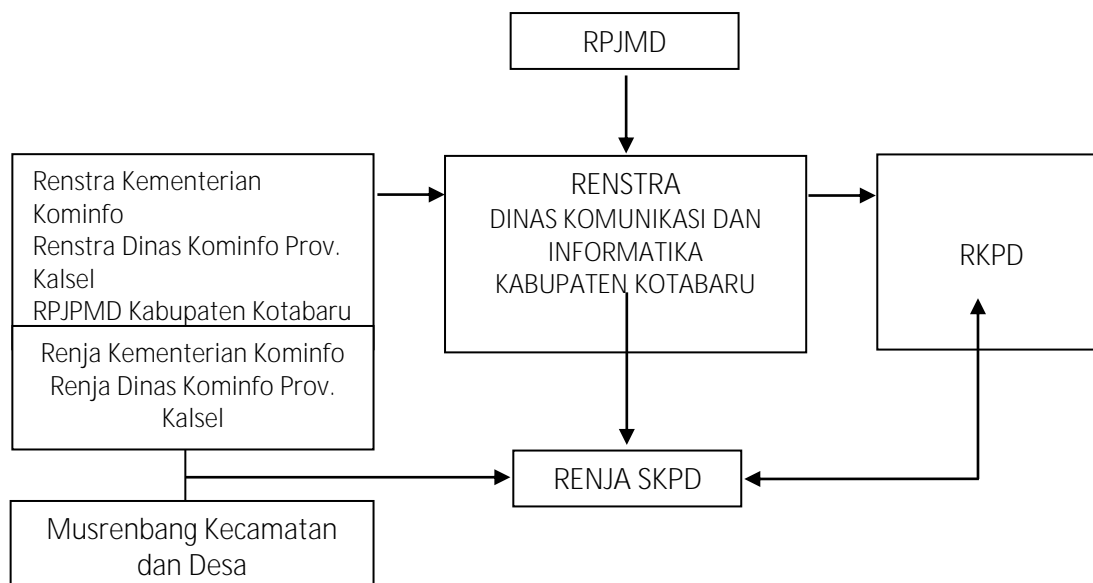
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra - PD), yang ditindaklanjuti dengan proses penjabaran untuk setiap tahunnya kedalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD).

Rencana Kerja SKPD adalah Penjabaran Rencana Strategis SKPD yang memuat segala bentuk kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Berdasarkan hal-hal tersebut sangat diperlukan penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru sebagai dokumen manajemen strategis.

Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berorientasi pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru, dan sebagai pedoman teknis dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan komunikasi dan informatika, sehingga dituntut lebih optimal dalam upaya untuk mendekatkan pelayanan secara prima kepada masyarakat, untuk itu peranan pembangunan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kotabaru tetap eksis menjadi andalan dalam mendukung sektor pariwisata dan pengembangan agrobisnis yang merupakan visi Kabupaten Kotabaru.

Alur penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1. Alur Penyusunan Renja



Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai salah satu dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan yang disusun berdasarkan fungsi pemerintah. Pemantapan perencanaan melalui Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2024, merupakan suatu langkah atau upaya untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan komunikasi dan informatika serta mewujudkan agenda pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Penetapan program, kegiatan dan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) pembangunan komunikasi dan informatika. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat.

## 1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika yang merupakan jabaran dari Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945



serta landasan Operasional dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pembangunan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996. Tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN. 2017/No. 77);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang(LN.2021/No.31);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I – 5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
32. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
34. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (BN.2020/No. 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2023 Pemutakhiran;
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 14);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Tanggal 21 Oktober 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);
49. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 28);
50. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 55 Tahun 2017 tanggal 15 November 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru.
51. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
53. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 8);
54. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 2).

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Kedudukan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2024, merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru. Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika disusun dengan maksud sebagai pedoman resmi secara teknis dalam

pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun kedepan, adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah:

1. Merumuskan program-program strategis dan prioritas yang berbasis pada sumberdaya lokalit guna pengembangan sektor komunikasi dan informatika guna mendukung pembangunan pariwisata dan agrobisnis.
2. Menyusun tolok ukur dalam menilai dan mengevaluasi Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru sebagai manifestasi pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotabaru, yang berbasis pada pengembangan teknologi komunikasi dan informatika dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Mengarahkan pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika menuju sektor komunikasi dan informatika yang tangguh dalam rangka pengembangan pembangunan di Kabupaten Kotabaru dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
4. Memungkinkan Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan sektor komunikasi dan informatika dalam pembangunan perekonomian di masa mendatang dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru disusun berdasarkan potensi wilayah dengan cara memaksimalkan keunggulan kompetitif daerah dan meminimalkan kelemahan internal, yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021-2026, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang pelaksanaannya dilakukan melalui dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten serta memungkinkan dukungan APBD Provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



Sistematika Penulisan Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru adalah :

**BAB I     PENDAHULUAN.**

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan dokumen Renja.

**BAB II    HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022.**

Menguraikan rumusan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, issue-issue penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal Perangkat Daerah, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan pembangunan nasional, propinsi dan daerah, tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika serta program dan kegiatan tahun 2024.

**BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian secara garis besar berkenaan dengan rekapitulasi program dan jumlah kegiatan tahun 2024.

**BAB V     PENUTUP.**

Menguraikan tentang hal-hal penting yang perlu mendapatkan atensi, baik dalam rangka pelaksanaan rencana kerja SKPD, yang memuat kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2022

Eksistensi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18), dan **Peraturan** Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Kotabaru. Dinas Komunikasi Dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengembangan pusat pertumbuhan dengan pembentukan kawasan sentra dipercepat dengan pengalokasian dana proforsional yang seimbang disetiap bidang dalam Perangkat Daerah, dengan Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana. Permasalahan yang akan terus selalu dihadapi dan menjadikannya sebuah tantangan yang merupakan aspek berkelanjutan, yaitu dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, serta meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat akan berpengaruh terhadap pola hidup atau gaya hidup. Kondisi ini akan berdampak terhadap tingginya tingkat penggunaan teknologi, termasuk teknologi komunikasi dan informatika. Sementara itu kemampuan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang masih belum memadai, karena keberhasilan pembangunan sektor komunikasi dan informatika sangat tergantung dari efektivitas kegiatan bidang dalam Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Kotabaru di bidang komunikasi dan informasi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggung-jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika.

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penetapan Kinerja Tahun 2022 merupakan komitmen seluruh unsur dinas, untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat program dengan indikator kinerja sasaran. Program adalah rencana jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan/sasaran. Adapun uraian sasaran maupun target-target yang dicapai pada tahun 2022 terkait dengan pelaksanaan program-program di bidang komunikasi dan informatika tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tingkat capaian indikator sasaran terhadap kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam kurun waktu Tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021 – 2026, secara garis besar dapat di jelaskan pada tabel berikut di bawah ini :

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Permasalahan yang akan terus selalu dihadapi dan menjadikannya sebuah tantangan yang merupakan aspek berkelanjutan, yaitu dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, serta meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat akan berpengaruh terhadap pola hidup atau gaya hidup. Kondisi ini akan berdampak terhadap tingginya tingkat penggunaan teknologi, termasuk teknologi komunikasi dan informatika. Sementara itu kemampuan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang masih belum memadai.

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Komunikasi Dan Informatika berdasarkan hasil identifikasi yang merupakan prioritas untuk dicarikan solusinya, adalah:

#### 1. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

- a. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan system informasi manajemen dan jaringan *e-government*
- b. Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi yang berlatar belakang teknis komunikasi dan informatika.
- c. Belum optimalnya fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah terbentuk sebagai media penyampaian dan penyebaran informasi.
- d. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi sangat beragam, dan perilaku masyarakat berkomunikasi di media sosial belum sepenuhnya disikapi dengan perilaku yang santun, ditambah informasi yang beredar di media non – mainstream cenderung bebas, dan kurang beretika sehingga proses komunikasi yang terjadi dapat mengarah ke hal – hal yang destruktif.
- e. Kurangnya SDM yang mendukung dalam pengembangan IT.

2. Pengelolaan Dan Pengembangan Informasi Publik
  - a. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi antar SKPD atau *e-government* yang telah terpasang dan belum optimalnya fungsi komunikasi publik sebagai government *public relation*.
  - b. Masih terdapat beberapa kecamatan/desa di wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru yang tidak terjangkau sinyal/jaringan komunikasi.
  - c. Sistem komunikasi yang tersedia belum termanfaatkan secara optimal.
  - d. Belum optimalnya pembinaan, layanan dan kerjasama dengan mitra media dalam pengelolaan komunikasi publik.
3. Pengelolaan Dan Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika
  - a. Belum meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi yang berakibat terjadinya ketidakseimbangan pertumbuhan dan perkembangan teknologi informatika dan komunikasi.
  - b. Masih sulit dan mahalnya biaya komunikasi karena tidak tersedianya/minimnya *Base Transceiver Station* (BTS)
  - c. Belum tersediannya data Tower dan penggunaan tower Bersama
  - d. Di bidang telekomunikasi dan aplikasi telematika untuk infrastruktur pelayanan Publik khususnya yang berkaitan jaringan internet belum memadai terlebih lagi bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan di mana banyak daerah yang *blank spot*.
  - e. Belum adanya Aplikasi Sistem Perkantoran dan Aplikasi sistem Pertukaran data antar SKPD Kabupaten Kotabaru.
4. Pengelolaan Dan Pengembangan Persandian
  - a. Mekanisme dan pengelolaan data yang belum terbentuk dalam suatu regulasi.

- b. Belum tersediannya Data Center yang mendukung pelaksanaan *e-Government* secara optimal.
  - c. Rendahnya tingkat keamanan dan mutu pengawasan yang akuntabel.
  - d. Kurangnya fungsi layanan pengawasan dan keterbatasan sumberdaya.
5. Strategi Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata Kelola data pemerintahan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Tujuan dari Satu Data adalah untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data serta data yang mudah di akses dan dibagipakaiakan.

Permasalahan dalam proses SDI ialah :

- a. Data yang belum berkualitas belum memenuhi standar dan tidak memiliki metadata.
- b. Sistem database sektoral yang belum terpadu belum seragamnya kode referensi
- c. Data yang sulit di akses dan tidak terintegrasi
- d. Ketidakjelasan unit pengelola data
- e. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola data

Strategi Satu Data Indonesia dalam proses satu data perlu didukung oleh teknologi yang maju mengingat data yang di proses sangatlah besar dan proses pertukaran data yang cepat dan aman perpaduan antara teknologi dan data yang terintegrasi dapat memudahkan masyarakat memperoleh data yang cepat dan akurat.

#### 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA SKPD

Konsep pembangunan komunikasi dan informatika masa depan harus dirumuskan secara komprehensif, dimana dapat mengantisipasi berbagai tantangan, seperti kebijakan global dan otonomi daerah, salah satu model yang dapat mengantisipasi tantangan perubahan global adalah pengembangan sistem komunikasi dan informatika yang berkelanjutan (*sustainable communication and information*).

Konsekuensi dari sebuah konsep tentunya tidak terlepas dari perencanaan kebijakan anggaran yang nantinya mampu mengoperasionalkan kebijakan program dan kegiatan. Review terhadap rancangan awal Renja berorientasi terhadap sebuah analisis berdasarkan kebutuhan, yang secara global dapat diuraikan pada tabel berikut:



## 2.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kebijakan otonomi daerah perlu diantisipasi oleh aparat pemerintah daerah, khususnya ditingkat kabupaten yang menjadi ujung tombak pembangunan, sehingga kabupaten dapat berbenah diri dalam menggali segala potensi baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu komponen penyusunan Renja SKPD tidak terlepas dari instrumen *bottom up planning*, yang diperoleh dari hasil musrenbang kecamatan maupun desa, berupa sebuah rancangan usulan kegiatan/pekerjaan dari masyarakat.

Secara umum, hasil usulan masyarakat melalui musrenbang kecamatan diperoleh data usulan berupa penguatan jaringan di wilayah *blankspot*. Kondisi *blankspot* akan berpengaruh terhadap segala bentuk aktivitas masyarakat, yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, budaya dan kepariwisataan.

Usulan masyarakat terhadap program penguatan jaringan telah diapresiasi oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru, melalui pengembangan *Base Transceiver Statition* (BTS) dalam sebuah usulan program/kegiatan Kabupaten Kotabaru, yang secara rinci dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel. 2.6 *Usulan Program Pengembangan Base Transceiver Station (BTS) Berdasarkan Usulan Masyarakat Tahun 2024*

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Fasilitas Komunikasi Yang diinginkan	Usulan Anggaran
1	2	3	4	5
1.	Kelumpang Hulu	Karang Liwar	Pembangunan Menara baru	
2.	Pulau Sembilan	Teluk sungai	Pembangunan Menara baru	
		Labuan barat	Pembangunan Menara baru	
		Maradapan	Pembangunan Menara baru	
		Desa Tengah	Pembangunan Menara baru	

		Birah-Birahan	Pembangunan Menara baru	
3.	Pulau Laut Tanjung Selayar	Teluk Tamiang	Pembangunan Menara baru	
4.	Pulau Laut Tengah	Sungup Kanan	Pembangunan Menara baru	
		Sungai Pasir	Pembangunan Menara baru	
		Semisir	Pembangunan Menara baru	
5.	Kelumpang Tengah	Senakin	Pembangunan Menara baru	
6.	Pulau Laut Selatan	Tanjung Seloka Utara	Pembangunan Menara baru	
7.	Pulau Laut Utara	Sebelimbingan	Pembangunan Menara baru	
8.	Hampang	Lalapin	Pembangunan Menara baru	
9.	Kelumpang Hilir	Tarjun	Pembangunan Menara baru	
		Langadai	Pembangunan Menara baru	
10.	Pulau Kerayaan	Pulau Kerayaan	Pembangunan Menara baru	
11.	Tanjung Selayar	Pulau Kerumputan	Pembangunan Menara baru	
12.	Pulau Sebuku	Pulau Samber Gelap	Pembangunan Menara baru	
13.	Kelumpang Selatan	Pantai	Pembangunan Menara baru	

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan Infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan Pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik

#### 3.2 TUJUAN RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pembangunan sektor komunikasi dan informatika di daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah yang akan terkait dengan reorientasi kebijaksanaan pembangunan daerah itu sendiri, sehingga pembangunan bidang komunikasi dan informatika akan menyelaraskan dengan paradigma baru pembangunan daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 - 2026, dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran agenda dalam pembangunan Kabupaten Kotabaru lima tahun kedepan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kotabaru.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 mengacu kepada visi Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 - 2026, yaitu *"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kotabaru Yang Semakin Mandiri Dan Sejahtera Melalui Peningkatan Di Bidang Agrobisnis Dan Kepariwisata"*. dan misi

Kabupaten sebagai laksanakan dasar Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menentukan langkah strategis dalam mengelola bidang urusan informasi dan komunikasi, persandian dan statistik di Kabupaten Kotabaru. Dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2021 – 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Perangkat Daerah yang berkewenangan sebagai pelaksana Misi ke 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten Kotabaru, yaitu "*Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel dan Transparan*" dan akan mempertanggung-jawabkan kinerja pada misi tersebut kepada Bupati Kotabaru.

Penetapan tujuan Pembangunan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru diarahkan kepada bidang-bidang strategik. Tujuan merupakan penjabaran atau implemetasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Tujuan Pembangunan komunikasi dan informatika Kabupaten Kotabaru menggambarkan arah strategik dan peluang-peluang yang ingin diciptakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan pembangunan komunikasi dan informatika Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pelayanan komunikasi dan informasi Publik.
2. Meningkatkan tata kelola e-government.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia tentang pengelolaan data statistik.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan keamanan informasi.
5. Meningkatkan tata kelola administrasi pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian

Sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik dapat diwujudkan dengan kebijakan strategis meningkatkan pengembangan dan pengelolaan tata pemerintahan berbasis e-government, meningkatkan penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan penyelenggaraan pengamanan informasi Pemerintah Daerah, meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik serta meningkatkan kualitas data statistik sektoral Kabupaten Kotabaru.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2024 akan fokus dalam mendukung pembangunan pemerintah dibidang pangan, pariwisata, infrastruktur, sumber daya manusia, pengaturan kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran, dan sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah, yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Seiring dengan tujuan tersebut diatas, diperlukan adanya kebijakan-kebijakan untuk menentukan arah pembangunan. Kebijakan umum pembangunan Komunikasi dan informatika dalam kurun waktu tahun satu tahun kedepan.

Disamping itu tujuan Pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Kotabaru juga berorientasi strategi komunikasi dan informasi yang akan dilaksanakan pada periode 2024 di Kalimantan Selatan, yaitu :

1. Memaksimalkan Program Desiminasi Informasi Nasional dengan memanfaatkan saluran Informasi Komunikasi Publik.
2. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, optimalisasi Pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial yaitu Lembaga Komunikasi Perdesaan ( KIM ) , Lembaga Media Tradisional ( FK -Metra ) , Lembaga Pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi profesi.
3. Memaksimalkan pemanfaatan Perangkat Media Center sebagai media online milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam diseminasi informasi kepada publik.
4. Memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur TIK yang sudah terbangun hingga ke pelosok desa dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis untuk pemberdayaan Aplikasi Telematika.
5. Menyiapkan Infrastruktur pembangunan Data Center untuk mengintegrasikan pembangunan dan pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Kalsel.
6. Mengembangkan Aplikasi Manajemen integrasi informasi dan pertukaran data pemerintah ( Mantara).
7. Melakukan pelayanan akses Internet kepada masyarakat umum degan memanfaatkan fasilitas Mobile Commonity Acces Point (MCAP/BCAP).

8. Mengembangkan Aplikasi (Kantaya) Kantor Maya/e-office untuk mengimplemntasikan e-government Pemerintah Prov.Kalsel.

Secara rinci tentang tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru dapat diuraikan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 *Tujuan Rencana kerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2024*

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatkan tata kelola pelayanan komunikasi dan informasi Publik	Persentase pelayanan komunikasi dan informasi Publik	90%
2.	Meningkatkan tata kelola e-government	Persentase pengelolaan aplikasi Informatika	65%
3.	Meningkatkan sumberdaya manusia tentang pengelolaan data statistik	Jumlah dokumen yang dilaksanakan dalam setahun	100%
4.	Meningkatkan tata kelola pelayanan keamanan informasi	Percentase pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi	60%
5.	Meningkatkan tata kelola administrasi pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian	Nilai adminstrasi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	BB

### 3.3 SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2024 dalam meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dengan sasaran, yang merupakan pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan dapat terwujud dalam proses pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2024, berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rensrta Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru dalam masa periode satu tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik.
2. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan e-government.
3. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral.
4. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda.
5. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru

Secara rinci tentang tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru dapat diuraikan pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 *Sasaran Rencana kerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2024*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Persentase pengembangan kerjasama kemitraan komunikasi dan informasi publi	90%
2.	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan e-government	Persentase banyaknya SKPD dengan sistem data yang terintegrasi berbasis aplikasi	65%
3.	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral	Persentase Layanan Item Data Statistik Sektoral Yang Disajikan Secara Akurat	98%
4.	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda	Persentase banyaknya SKPD yang menerapkan keamanan informasi	60%
5.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	BB

### 3.4 STRATEGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Strategi merupakan langkah yang akan diambil dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang secara umum adalah mendorong berkembangnya sektor komunikasi dan informatika dengan memanfaatkan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana yang berorientasi kepada kebijakan pembangunan daerah.

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2024 untuk mencapai misi ke 3 (tiga) yaitu : "*Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel dan Transparan*". Strategi pembangunan dalam satu tahun kedepan untuk meningkatkan transparansi



informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru dalam tahun 2024 dengan strategi pembangunan sebagai berikut :

1. Akselerasi pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik.
2. Akselerasi pelaksanaan penerapan e-government.
3. Akselerasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral.
4. Akselerasi penerapan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda.
5. Akselerasi pengelolaan pelayanan administrasi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian.

### 3.5 ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Arah kebijakan dalam pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2024, merupakan langkah dalam mewujudkan strategi dalam pembangunan di bidang urusan komunikasi dan informatika, bidang urusan persandiaan dan bidang statistik dalam kurun waktu Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2024, Berdasarkan kebijakan pembangunan Kabupaten Kotabaru, dan dalam usaha untuk mencapai tujuan Dinas Komunikasi Dan Informatika, maka dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik.
2. Optimalisasi pelaksanaan penerapan e-government.
3. Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral.
4. Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda.
5. Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian.

Secara rinci tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 3.3 *Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2024*

VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KOTABARU YANG SEMAKIN MANDIRI DAN SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN DI BIDANG AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN			
MISI	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel dan Transparan			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan tata kelola pelayanan komunikasi dan informasi Publik	pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Akselerasi pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik
2.	Meningkatkan tata kelola e-government	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan e-government	Akselerasi pelaksanaan penerapan e-government	Optimalisasi pelaksanaan penerapan e-government
3.	Meningkatkan sumberdaya manusia tentang pengelolaan data statistik	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral	Akselerasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral	Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral
4.	Meningkatkan tata kelola pelayanan keamanan informasi	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda	Akselerasi penerapan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda	Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda
5.	Meningkatkan tata kelola administrasi pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral, Nilai Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	Akselerasi pengelolaan pelayanan administrasi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian	Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru yang merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sektor komunikasi dan informatika akan terus berlanjut dan di prioritaskan sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru, dalam rangka mewujudkan misi 3, yaitu : “Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel dan Transparan” yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD berdasarkan urusan, yang menjadi bagian urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, meliputi :

- I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , dengan program prioritas :
  1. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
  2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
- II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK, dengan program prioritas :
  1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
- III. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN, dengan program prioritas
  1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
- IV. NON URUSAN, dengan program prioritas
  1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Dalam rangka mengoptimalkan program-program tersebut diatas, tentu kegiatan dan sub kegiatannya tetap merupakan kelanjutan dari kebijakan percepatan dan peningkatan produktivitas melalui pengembangan teknologi komunikasi dan informatika yang difokuskan dengan mengakomodir icon-icon yang menjadi visi, misi, tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah.

Dalam rencana pendanaan program dan kegiatan yang akan di laksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru dapat di kelompokkan menjadi dua sasaran program dan kegiatan yang teridiri dari :

#### 4.1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkenaan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Komunikasi dan Informasi

Dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2024, yang berisikan program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan yang ditetapkan. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan difokuskan untuk pencapaian tujuan meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran meningkatnya pengembangan dan pengelolaan peta pemerintahan berbasis e-government, meningkatnya penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas data statistik sektoral Kabupaten Kotabaru yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, dalam rangka upaya pencapaian indikator kinerja utama dalam Renja Kabupaten Kotabaru tahun 2024, untuk melihat rencana program dan kegiatan prioritas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tergambar pada tabel sebagai berikut :

#### 4.2. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Permasalahan yang akan terus selalu dihadapi dan menjadikannya sebuah tantangan yang merupakan aspek berkelanjutan, yaitu dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, serta meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat akan berpengaruh terhadap pola hidup atau gaya hidup. Kondisi ini akan berdampak terhadap tingginya tingkat penggunaan teknologi, termasuk teknologi komunikasi dan informatika. Sementara itu kemampuan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang masih belum memadai.

Permasalahan yang diprediksi akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan komunikasi dan informatika pada tahun 2024 serta untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kotabaru perlu diwaspadai.

Tabel 4.2. *Indikatif Permasalahan dan Solusi*

No	Permasalahan	Solusi
1.	Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan system informasi manajemen dan jaringan <i>e-government</i>	1. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Optimalisasi SDM dengan program peningkatan wawasan dan keahlian melalui diklat/bimtek implementasi teknologi informatika.
	Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi yang berlatar belakang teknis komunikasi dan informatika	Optimalisasi SDM yang tersedia, dengan tetap upaya untuk memenuhi SDM yang sesuai keahlian, berdasarkan kebutuhan daerah.

No	Permasalahan	Solusi
	Belum optimalnya fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah terbentuk sebagai media penyampaian dan penyebaran informasi	Pemberdayaan dan mengikutsertakan KIM dalam berbagai kegiatan berkenaan dengan penyebaran informasi.
	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi sangat beragam, dan perilaku masyarakat berkomunikasi di media sosial belum sepenuhnya disikapi dengan perilaku yang santun, ditambah informasi yang beredar di media non – mainstream cenderung bebas, dan kurang beretika sehingga proses komunikasi yang terjadi dapat mengarah ke hal – hal yang destruktif.	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada pengguna media komunikasi dan informasi, berkenaan dengan rambu-rambu yang dapat mengarahkan pengguna media untuk lebih dewasa dan bijaksana untuk dalam memanfaatkan media.
	Kurangnya SDM yang mendukung dalam pengembangan IT	Optimalisasi SDM dengan program peningkatan wawasan dan keahlian melalui diklat/bimtek implementasi teknologi informatika
2.	Pengelolaan Dan Pengembangan Informasi Publik	2. Pengelolaan Dan Pengembangan Informasi Publik
	Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi antar SOPD atau <i>e-government</i> yang telah terpasang dan belum optimalnya fungsi komunikasi publik sebagai government <i>public relation</i>	Peningkatan dan pengembangan jaringan komunikasi, pengembangan website SOPD serta peningkatan kualitas SDM pengelola dan optimalisasi fungsi komunikasi publik sebagai government <i>public relation</i>
	Masih terdapat beberapa kecamatan/desa di wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru yang tidak terjangkau sinyal/jaringan komunikasi	Peningkatan dan pengembangan BTS dan menara seluler serta Pelayanan Mobile Community Access Point dan Boat Community Access Point.
	Sistem komunikasi yang tersedia belum memanfaatkan secara optimal	Optimalisasi dan sosialisasi pemanfaatan system/media komunikasi.
	Belum optimalnya pembinaan, layanan dan kerjasama dengan mitra media dalam pengelolaan komunikasi publik	Optimalisasi pembinaan, layanan dan kerjasama dengan mitra media dalam pengelolaan komunikasi publik
3.	Pengelolaan Dan Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika	3. Pengelolaan Dan Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika
	Belum meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi yang berakibat terjadinya ketidakseimbangan pertumbuhan dan perkembangan teknologi informatika dan komunikasi	Optimalisasi infrastruktur informasi dan komunikasi yang tersedia, dan peningkatan program peningkatan sarana dan prasarana teknologi informatika dan komunikasi
	Masih sulit dan mahal biaya komunikasi karena tidak tersedianya/minimnya <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	Optimalisasi, pengembangan dan peningkatan ketersediaan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS).

No	Permasalahan	Solusi
	<p>Belum tersediannya data Tower dan penggunaan tower Bersama</p> <p>Di bidang telekomunikasi dan aplikasi telematika untuk infrastruktur pelayanan Publik khususnya yang berkaitan jaringan internet belum memadai terlebih lagi bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan di mana banyak daerah yang <i>blank spot</i></p> <p>Belum adanya Aplikasi Sistem Perkantoran dan Aplikasi sistem Pertukaran data antar SOPD Kabupaten Kotabaru</p>	<p>Melaksanakan inventarisasi data tower, serta membangun kerjasama dengan berbagai institusi terhadap penggunaan tower</p> <p>Meminimalisasi wilayah wilayah blankspot, dengan melaksanakan pendataan wilayah blankspot, dan pengembangan jaringan telekomunikasi</p> <p>Pengembangan dan pembuatan aplikasi sistem perkantoran dan aplikasi sistem pertukaran data antar SOPD Kabupaten Kotabaru</p>
4.	<p>Pengelolaan Dan Pengembangan Persandian Dan Statistik</p> <p>Mekanisme dan pengelolaan data yang belum terbentuk dalam suatu regulasi</p> <p>Belum tersediannya Data Center yang mendukung pelaksanaan E-Government secara optimal</p>	<p>4. Pengelolaan Dan Pengembangan Persandian Dan Statistik</p> <p>Membangun kerjasama dengan Bappeda dan BPS (Biro Pusat Statistik) untuk penyusunan regulasi berkenaan dengan mekanisme dan pengelolaan data</p> <p>Penyusunan perencanaan pengelolaan pusat data melalui aplikasi SIMATRA guna mendukung pelaksanaan E-Government secara optimal</p>



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 merupakan dasar perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) untuk kurun waktu satu tahun kedepan dalam rangkaian enam tahun program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra. Penyusunan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman perencanaan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru yang bersifat teknis dan strategis untuk 1 (satu) tahun kedepan.

Perubahan lingkungan strategis yang tidak terduga, merupakan kendala yang dihadapi, sehingga kebijakan dan program yang telah dirumuskan dalam rencana kerja tentunya akan menjadi penghambat dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 merupakan tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan tahun kedua Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sehingga diperlukan dan dipersiapkan SDM Komunikasi dan Informatika yang handal dan profesional yang didukung dengan sarana parasana, mobilitas, anggaran dan kebijakan stakeholder.

Kotabaru,     September 2023  
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kotabaru

Ir. KAMIRUDIN, M.Si  
NIP. 19661222 199503 1 004  
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan  
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022 Kabupaten Kotabaru  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru

[illegible]

[illegible]



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan(2023)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	13 dokumen	325
X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	12 dokumen	300
X	XX	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	300
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	548 kali	548 kali	548 kali	548 kali	100	560 kali	1,656 kali	302
X	XX	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	300
X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	300
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0	1 Paket	1 Paket	0
X	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	6 Orang	6 Orang	0
X	XX	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	100	9 jenis	27 jenis	300
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26 buah	26 jenis	26 buah	26 buah	100	25 buah	77 buah	296

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan(2023)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	6 paket	300
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	6 paket	300
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	1 unit	1 unit	0

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)		Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
	Pelayanan Informasi Publik			1.532 examp	3.600 examp	3.600 examp		1532 examp	3600 examp	3.600 examp		
	Layanan Hubungan Media			30 media	31 media	31 media		30 media	31 media	31 media		
	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota			1 paket	0	1 unit		1 paket	0	1 unit		
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
2	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota			100%	100%	100%		100%	100%	100%		



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)		Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemda			0	0	1 dokumen		0	0	1 dokumen		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			20 domain dan subdomain	20 domain dan subdomain	0		20 domain dan subdomain	20 domain dan subdomain	0		
3	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			0	0	1 dokumen		0	0	1 dokumen		
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			16 website	56 email	1 dokumen		16 website	56 email	1 dokumen		
	Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis elektronik			0	1 dokumen	0		0	1 dokumen	0		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			0	0	1 dokumen		0	0	1 dokumen		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			100%	100%	100%		100%	100%	100%		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)		Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			4 kali	2 dokumen	2 dokumen		4 kali	2 dokumen	2 dokumen		
	Membangun Metadata Statistik Sektoral			4 kali	2 dokumen	2 dokumen		4 kali	2 dokumen	2 dokumen		
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			1 sosialisasi	1 sosialisasi	1 sosialisasi		1 sosialisasi	1 sosialisasi	1 sosialisasi		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
5	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			0 laporan	0 laporan	52 laporan		0 laporan	0 laporan	52 laporan		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)		Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			23 kegiatan	12 SKPD dan Kecamatan	30 laporan		20 Kegiatan	12 SKPD dan Kecamatan	30 laporan		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
6	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 dokumen	4 dokumen			5 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 dokumen	4 dokumen			4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		
7	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			548 kali	548 kali	560 kali		548 kali	548 kali	560 kali		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)		Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9 jenis	9 jenis	9 jenis		9 jenis	9 jenis	9 jenis		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26 jenis	26 buah	25 buah		26 jenis	26 buah	25 buah		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.959 paket	3 paket	3 paket		7.959 paket	3 paket	3 paket		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			18.183 lembar	18.183 buah	18.183 buah		18.183 lembar	18.183 buah	18.183 buah		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.400 examp	1.400 examp	1.400 examp		1.400 examp	1.400 examp	1.400 examp		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			50 paket	50 paket	50 paket		50 paket	50 paket	50 paket		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			204 OH	280 OH	200 OH		204 OH	280 OH	200 OH		
9	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	0	1 unit		0	0	1 unit		
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			0	5 unit	0		0	5 unit	0		
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			453 surat	353 surat	353 surat		453 surat	353 surat	353 surat		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)		Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			84 kali	84 kali	84 kali		84 kali	84 kali	84 kali		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10 kali	24 kali	20 kali		10 kali	24 kali	20 kali		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			36 bulan	48 OB	48 OB		36 bulan	48 OB	48 OB		
11	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2 paket	2 paket	2 paket		2 paket	2 paket	2 paket		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2 paket	2 paket	2 paket		2 paket	2 paket	2 paket		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0	0	1 unit		0	0	1 unit		

Tabel 2.4.  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kabupaten Kotabaru

PD : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru

Rancangan Awal RENJA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten	Tingkat Pencapaian Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	6,273,400,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten	Tingkat Pencapaian Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	6,273,400,000	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	8 dokumen	255,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	8 dokumen	255,000,000	
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	90,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	90,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 kali	80,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 kali	80,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	85,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	85,000,000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten	Jumlah Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 paket	4,470,000,000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten	Jumlah Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 paket	4,470,000,000	
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4,000,000,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten	Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	548 kali	440,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten	Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	548 kali	440,000,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	15,000,000	

Tabel 24. Format T-C.31

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten	Jumlah penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	15,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten	Jumlah penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	15,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten	Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 paket	130,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten	Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 paket	130,000,000	
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Kabupaten	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	45,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Kabupaten	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	45,000,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Kabupaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	6 orang	85,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Kabupaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	6 orang	85,000,000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten	Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 paket	716,400,000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten	Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 paket	716,400,000	
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	15 Jenis	30,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	15 Jenis	30,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	26 Unit/Buah	55,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	26 Unit/Buah	55,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	7,959 Paket	165,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	7,959 Paket	165,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18,200 Buah/lembar	35,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18,200 Buah/lembar	35,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,400 Eksemplar	8,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,400 Eksemplar	8,400,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	50 Paket	13,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	50 Paket	13,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	260 OH	410,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	260 OH	410,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten	Jumlah ketersediaan jasa penunjang	1 Paket	75,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten	Jumlah ketersediaan jasa penunjang	1 Paket	75,000,000	

Tabel 24 Format T-C.31

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit/Buah	75,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit/Buah	75,000,000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten	Jumlah ketersediaan jasa penunjang	4 Paket	387,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten	Jumlah ketersediaan jasa penunjang	4 Paket	387,000,000	
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	353 Surat	12,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	353 Surat	12,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84 kali	190,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84 kali	190,000,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	24 kali	55,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	24 kali	55,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	48 OB	130,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	48 OB	130,000,000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten	Jumlah perawatan pemeliharaan barang milik daerah	4 Paket	240,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten	Jumlah perawatan pemeliharaan barang milik daerah	4 Paket	240,000,000	
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 Paket	70,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 Paket	70,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Paket	120,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Paket	120,000,000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	50,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	50,000,000	



Tabel 24 Format T-C.31

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kabupaten	Tingkat Pencapaian Urusan Informasi Dan Komunikasi Publik	100 %	3,325,000,000	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kabupaten	Tingkat Pencapaian Urusan Informasi Dan Komunikasi Publik	100 %	3,325,000,000	
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	3 Paket	3,325,000,000	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	3 Paket	3,325,000,000	
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten	Jumlah pelayanan informasi publik	3,600 Eksemplar	425,000,000	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten	Jumlah pelayanan informasi publik	3,600 Eksemplar	425,000,000	
Layanan Hubungan Media	Kabupaten	Jumlah layanan hubungan media	31 Media	2,500,000,000	Layanan Hubungan Media	Kabupaten	Jumlah layanan hubungan media	31 Media	2,500,000,000	
Penyediaan/pengadaan sarana dan prasana pendukung informasi dan Komunikasi Publik Pemda kab/Kota	Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 unit	400,000,000	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasana pendukung informasi dan Komunikasi Publik Pemda kab/Kota	Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 unit	400,000,000	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kabupaten	Tingkat pencapaian implementasi aplikasi informatika	100 %	1,825,000,000	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kabupaten	Tingkat pencapaian implementasi aplikasi informatika	100 %	1,825,000,000	
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Kegiatan :	Kabupaten	Jumlah Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain yang telah Ditetapkan oleh	1 Paket	520,000,000	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Kegiatan :	Kabupaten	Jumlah Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain yang telah Ditetapkan oleh	1 Paket	520,000,000	
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemda	Kabupaten	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemkab.	15 domain dan subdomain	300,000,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemda	Kabupaten	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemkab.	15 domain dan subdomain	300,000,000	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten	Jumlah penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	20 domain dan subdomain	220,000,000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten	Jumlah penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	20 domain dan subdomain	220,000,000	
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :	Kabupaten	Jumlah Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	1 Paket	1,305,000,000	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :	Kabupaten	Jumlah Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	1 Paket	1,305,000,000	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemda, Kab /Kota	Kabupaten	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemkab	15 tatalaksana	200,000,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemda, Kab /Kota	Kabupaten	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemkab	15 tatalaksana	200,000,000	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten	Jumlah penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	56 email	220,000,000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten	Jumlah penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	56 email	220,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik di Lingkup Pemkab	21 kali	200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik di Lingkup Pemkab	21 kali	200,000,000	

Tabel 24 Format T-C.31

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis elektronik	Kabupaten	Jumlah pengembangan aplikasi dan proses bisnis sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terdokumentasi	1 dokumen	410,000,000	Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis elektronik	Kabupaten	Jumlah pengembangan aplikasi dan proses bisnis sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terdokumentasi	1 dokumen	410,000,000	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya	Kabupaten	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemda	4 orang	60,000,000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya	Kabupaten	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemda	4 orang	60,000,000	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kabupaten	Jumlah Laporan Indeks SPBE Pemkab. Kotabaru	21 laporan	215,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kabupaten	Jumlah Laporan Indeks SPBE Pemkab. Kotabaru	21 laporan	215,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kabupaten	Tingkat pencapaian penyelenggaraan statistik sektoral	100 %	1,135,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kabupaten	Tingkat pencapaian penyelenggaraan statistik sektoral	100 %	1,135,000,000	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah pengelolaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1,135,000,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah pengelolaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1,135,000,000	
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 Dokumen	395,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 Dokumen	395,000,000	
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten	Jumlah Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	2 orang	40,000,000	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten	Jumlah Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	2 orang	40,000,000	
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten	Jumlah membangun metadata statistik sektoral	1 Dokumen	350,000,000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten	Jumlah membangun metadata statistik sektoral	1 Dokumen	350,000,000	
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kabupaten	Jumlah penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah	1 sosialisasi	350,000,000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kabupaten	Jumlah penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah	1 sosialisasi	350,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kabupaten	Tingkat Pencapaian Urusan Informasi Dan Komunikasi Publik	100%	455,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kabupaten	Tingkat Pencapaian Urusan Informasi Dan Komunikasi Publik	100%	455,000,000	

Tabel 24. Format T-C.31

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah kegiatan pembinaan keamanan informasi SKPD	12 SKPD (5 SKPD Kab dan 7 SKPD Kec)	275,000,000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah kegiatan pembinaan keamanan informasi SKPD	12 SKPD (5 SKPD Kab dan 7 SKPD Kec)	275,000,000	
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52 laporan	75,000,000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52 laporan	75,000,000	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten	Jumlah pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	12 SKPD (5 SKPD Kab dan 7 SKPD Kec)	200,000,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten	Jumlah pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	12 SKPD (5 SKPD Kab dan 7 SKPD Kec)	200,000,000	
Kegiatan Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah kabupaten/kota	Kabupaten	Jumlah Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) /Jumlah SKPD	12 SKPD (5 SKPD Kab dan 7 SKPD Kec)	180,000,000	Kegiatan Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah kabupaten/kota	Kabupaten	Jumlah Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) /Jumlah SKPD	12 SKPD (5 SKPD Kab dan 7 SKPD Kec)	180,000,000	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten	Jumlah pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	12 SKPD (5 SKPD Kab dan 7 SKPD Kec)	180,000,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten	Jumlah pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	12 SKPD (5 SKPD Kab dan 7 SKPD Kec)	180,000,000	
				13,013,400,000					13,013,400,000	

Tabel 2.5.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kabupaten Kotabaru

PD : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru

No	Rancangan Awal RENJA				Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kabupaten	Tingkat Pencapaian Urusan informasi Dan Komunikasi Publik	100 %	
1.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	3 Paket	
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kabupaten	Tingkat pencapaian implementasi aplikasi informatika	100 %	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	1 Paket	
2.2	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	1 Paket	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kabupaten	Tingkat pencapaian penyelenggaraan statistik sektoral	100 %	
3.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah pengelolaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	5 Dokumen	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kabupaten	Tingkat Pencapaian Urusan informasi Dan Komunikasi Publik	100%	
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah kegiatan pembinaan keamanan informasi SKPD	12 SKPD (5 SKPD Kab dan 7 SKPD Kec)	
4.2	Kegiatan Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah kabupaten/kota	Kabupaten	Jumlah Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) /Jumlah SKPD	1 Opras	

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  
Tahun 2024 dan Prakiraan Mju Tahun 2025  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Prog/Keg/Sub	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Mju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	BELANJA DAERAH							18,232,397,570				21,392,000,000
1	02				Non Urusan			11,896,038,681				13,942,000,000
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	11,896,038,681			100%	13,942,000,000
2	16	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	175,994,750			100%	225,000,000
2	16	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	89,999,880	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		4 dokumen	125,000,000
2	16	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	85,994,900	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		4 dokumen	100,000,000
2	16	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	9,510,534,491			100%	10,610,000,000
2	16	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	8,950,663,156	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	10,000,000,000
2	16	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	548 kali	529,569,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		548 kali	550,000,000
2	16	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	-
2	16	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	11,160,106	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	20,000,000
2	16	01	202	07	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	18 Laporan	9,159,536	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Laporan	20,000,000
2	16	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan	2 Laporan	9,982,343	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	20,000,000
2	16	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	266,925,000				315,000,000
2	16	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	182,000,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1 Paket	185,000,000
2	16	01	205	11	Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	84,925,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		6 Orang	130,000,000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg/Sub	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2 16 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	869.951,150			100%	793.000,000
2 16 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotabaru	15 Jenis	29.997,500	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		15 Jenis	40.000,000
2 16 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	26 unit/buah	54.999,300	Pendapatan Transfer		26 unit/buah	65.000,000
2 16 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Kab. Kotabaru	7.959 Paket	277.729,500	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		7.959 Paket	175.000,000
2 16 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotabaru	18.200 buah/membar	34.999,850	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		18.200 buah/membar	40.000,000
2 16 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotabaru	1.400 Exemplar	9.240,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.400 Exemplar	10.000,000
2 16 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kotabaru	50 Paket	12.993,000	Pendapatan Transfer		50 Paket	13.000,000
2 16 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotabaru	270 OH	449.992,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		270 OH	450.000,000
2 16 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Sesuai Juklak dan Juknis Peraturan Yang Berlaku		100%	261.069,000			100%	550.000,000
2 16 01 2 07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotabaru	95 unit/buah	261.069,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		95 unit/buah	550.000,000
2 16 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		100%	546.582,540			100%	1.179.000,000
2 16 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotabaru	353 surat	11.986,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		353 surat	14.000,000
2 16 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotabaru	84 kali	244.741,540	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		84 kali	250.000,000
2 16 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	24 kali	54.990,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		24 kali	65.000,000
2 16 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotabaru	396 OB	234.865,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		396 OB	850.000,000
2 16 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Sesuai Juklak dan Juknis Peraturan Yang Berlaku		100%	264.981,750			100%	270.000,000
2 16 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotabaru	2 Paket	69.990,750	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2 Paket	80.000,000
2 16 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotabaru	2 Paket	124.991,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2 Paket	130.000,000
2 16 01 2 09 03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Kab. Kotabaru	2 Unit	70.000,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2 Unit	60.000,000
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.379.501,013				5.675.000,000
2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			100%	4.219.248,763			100%	4.170.000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg/Sub	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	16	02	201		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100%	4,219,248,763			100%	4,170,000,000
2	16	02	201	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kab. Kotabaru	3.600 Exemplar	486,103,500	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		3.600 Exemplar	450,000,000
2	16	02	201	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kotabaru	43 Media	3,123,821,213	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		43 Media	3,000,000,000
2	16	02	201	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab. Kotabaru	1 dokumen	199,999,850	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1 dokumen	220,000,000
2	16	02	201	13	Penyediaan /Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemda Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Kotabaru	1 unit	409,324,200	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1 unit	500,000,000
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			100%	1,160,252,250			100%	1,505,000,000
2	16	03	201		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100%	625,253,900			100%	675,000,000
2	16	03	201	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemda	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemkab. Kotabaru	Kab. Kotabaru	15 domain dan sub domain	299,999,900	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		15 domain dan sub domain	325,000,000
2	16	03	201	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kotabaru	1 unit	325,254,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1 unit	350,000,000
2	16	03	202		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100%	534,998,350			100%	830,000,000
2	16	03	202	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	99,999,750	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1 Dokumen	350,000,000
2	16	03	202	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kotabaru	56 Email	219,999,600	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		56 email	250,000,000
2	16	03	202	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Indeks SPBE Pemkab. Kotabaru	Kab. Kotabaru	21 laporan	214,999,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		21 laporan	230,000,000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				599,862,950				1,250,000,000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg/Sub	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			100%	599,862,950			100%	1,250,000,000
2	20	02	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			100%	599,862,950			100%	1,250,000,000
2	20	02	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kotabaru	1 dokumen	224,999,450	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1 dokumen	420,000,000
2	20	02	201	02	Peningkatan Kapasitas SDMPemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDMPemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kotabaru	2 orang	39,985,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2 orang	70,000,000
2	20	02	201	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Kotabaru	1 dokumen	206,777,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1 dokumen	380,000,000
2	20	02	201	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab. Kotabaru	1 sosialisasi	128,101,500	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1 sosialisasi	380,000,000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				356,994,926				525,000,000
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			100%	356,994,926			100%	525,000,000
2	21	02	201		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100%	244,995,156			100%	325,000,000
2	21	02	201	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	1 Laporan	144,995,300	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		52 Laporan	100,000,000
2	21	02	201	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kotabaru	1 laporan	99,999,856	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		12 SKPD dan Kecamatan	225,000,000
2	21	02	202		Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			100%	111,999,770			100%	200,000,000
2	21	02	202	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasionalisasi	Kab. Kotabaru	12 perangkat daerah	111,999,770	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1 opras	200,000,000